

BAB IV

KESIMPULAN

IV.1 Kesimpulan

Perdagangan perempuan tidak dapat dilepaskan dari sub-kawasan Mekong di Asia Tenggara. Sub kawasan ini merupakan salah satu sumber, transit dan tujuan dari perdagangan perempuan. Kamboja menjadi salah satu negara sumber perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual (*seks trafficking*), perdagangan perempuan di Kamboja terdiri dari perdagangan perempuan berskala kecil sampai perdagangan perempuan berskala besar. Perdagangan perempuan terjadi di Kamboja karena masih adanya perbedaan jender di masyarakat Kamboja, kemiskinan yang masih terjadi di daerah-daerah pedesaan dan masih kurangnya akses pendidikan bagi generasi penerus Kamboja. Masyarakat Kamboja hanya mendapatkan penghasil dalam satu hari kurang dari US\$ 1.25, membuat banyak para perempuan yang ingin mencari pekerjaan diluar negeri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Ketidak mapanan dalam ekonomi dan pendidikan membuat para perempuan Kamboja akan sangat mudah termakan oleh janji-janji para *traffickers*. Para *traffickers* akan menjual para perempuan Kamboja di Thailand. Thailand menjadi negara tujuan perdagangan perempuan karena memiliki ekonomi yang lebih mapan dan besarnya pasar industri prostitusi di Thailand, sehingga permintaan untuk para perempuan sangat tinggi. Akan tetapi, arus perdagangan perempuan yang terjadi di Kamboja menuju Thailand mendapat kencaman dari Amerika dan LSM HAM domestik dan Internasional. Amerika dan LSM HAM meminta kedua negara untuk melakukan sebuah kerjasama bilateral untuk mengatasi perdagangan perempuan yang terjadi di kedua negara. Maka pada tahun 2003, ditanda tangani lah MoU *Bilateral Cooperation in Eliminating Trafficking in Children and Women and Assisting Victims of Trafficking*.

MoU ini sebagai komitmen awal kedua negara untuk menghapuskan segala bentuk perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di kedua negara. Didalam MoU juga dijelaskan bentuk-bentuk kerjasama apa saja yang akan dilakukan kedua negara. Adapun bentuk-bentuk kerjasama tersebut digolongkan akan

beberapa tindakan yaitu tindakan pencegahan, tindakan perlindungan, upaya pemulangan, reintegrasi dan *join task force*.

Kondisi perdagangan perempuan yang terjadi dilapangan kedua negara pada tahun 2009 mencapai angka tertinggi dalam beberapa tahun sebelumnya. Tetapi justru pada tahun berikutnya mengalami penurunan. Perdagangan perempuan yang terjadi di Kamboja karena adanya permintaan pasar akan perempuan yang terjadi di Thailand sebagai salah satu negara dengan industri prostitusi. Faktor lain juga menyebabkan terjadinya perdagangan perempuan dari Kamboja menuju Thailand. Faktor pendorong terjadi di Kamboja dan faktor penarik terjadi di Thailand. Faktor pendorong yang terjadi di Kamboja yaitu kemiskinan, masalah ekonomi selalu menjadi penyebab terjadi suatu ancaman bagi suatu negara. Penduduk Kamboja yang rata-rata masih berada digaris kemiskinan menyebabkan banyaknya penduduk Kamboja terutama perempuan ingin bekerja di luar negeri untuk memperbaiki kehidupan mereka di kampung halaman. Akan tetapi kemiskinan membuat seorang perempuan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan adalah faktor kedua dalam maraknya perdagangan perempuan di Kamboja. Putus sekolahnya seorang perempuan membuat seorang perempuan sedikit pengetahuan akan dunia luar dan mudah sekali diberikan janji-janji manis untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di negara orang. Lebih bahaya adalah ketika seorang perempuan tidak mendapatkan pendidikan sama sekali, maka akan sangat mudah menjadi korban eksploitasi seksual di negara tujuannya nanti. Rendahnya tingkat pendidikan pada perempuan Kamboja karena berbenturan dengan sosial budaya yang berkembang di Kamboja. Dalam lingkup sosial, masyarakat Kamboja masih mendiskriminasi perempuan yang bekerja di bidang prostitusi, anggapan miring masyarakat membuat semakin terasingkannya perempuan Kamboja yang menjadi Korban perdagangan perempuan dan lalu ada lingkup budaya, budaya masyarakat Kamboja yang dipengaruhi oleh agama Buddha membuat perbedaan jender terjadi. Faktor pendorong ini semakin mengasingkan perempuan dan ingin pergi dari Kamboja terlebih ada faktor penarik yang berasal dari Thailand yang semakin memberikan harapan kehidupan yang lebih layak bagi perempuan Kamboja.

Faktor penarik sebagai pemicu perdagangan perempuan masuk ke Thailand adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, terbukti dengan GDP yang meningkat setiap tahun dan angka pengangguran yang berkurang. Lalu ada pariwisata, pariwisata menawarkan pemaasan yang sangat besar bagi sebuah negara. Thailand memanfaatkan pariwastanya dengan sangata baik sehingga Thailanda selalu menajadi engara tujuan wisata bagi turis manca negara dan industri prostitusi di Thailand turut berkontribusi dalam perdagangan permepuan yang terjadi dari kamboja Menuju Thailand. Permintaan pasar akan perempuan untuk bekerja di bidang seks membuat para *traffickers* mencari cara untuk mendapatkan perempuan yang mau bekerja di Thailand tanpa tahu tujuan akhir mereka nantinya bekerja di industri seks. Maka dari itu butuh upaya kerjasama dalam mengatasi perdagangan perempuan yang terjadi, bentuk kerjasama ini seperti upaya pencegahan agar tidak terjadi kembali perdagangan perempuan, upaya perlindungan, upaya pemulangan korban dari negara tujuan dan proses reintegrasi.

Kedua negara dalam menerapkan upaya-upaya pencegahan terjadinya perdagangan perempuan melakukan upaya reformasi hukum. Kamboja dan Thailand sama-sama mengeluarkan produk hukum terbaru. Keluarnya hukum dalam mengatasi perdagangan perempuan juga diikuti dengan serangkaian kegiatan seperti seminar, workshop dan training bagi para pejabat penegak hukum. Lalu ada upaya mengkontrol perbatasan secara bersama-sama. Kedua negara sepakat untuk bergabung dalam *The PATROL Projek*, PATROL sendiri akan menagadakan survei terlebih dahulu sebelum memutuskan program apa yang akan diberikan kepada masing-masing negara. Kamboja dan Thailand mendapatkan program pelatihan dalam membedakan imigran gelap dengan perdagangan perempuan. Upaya selanjutnya adalah memberikan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk tidak adanya lagi korban sehingga fokus dalam upaya ini tidak hanya perempuan yang menajadi korban tetapi juga generasi muda Kamboja agar tidak terjerat arus perdagangan perempuan. Terakhir adalah upaya dalam mengkampanyekan anti-perdagangan perempuan. Kampanye ini dilakukan kedua negara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan program kampanye ini biasanya adalah

pemerintah kedua negara menyebarkan brosur, iklan yang bersifat memberikan informasi di media cetak dan elektronik. Upaya dalam menyebarkan informasi juga dengan mengadakan workshop yang ditayangkan secara nasional.

Tetapi dalam setiap langkah untuk mengatasi perdagangan perempuan tentu menemui hambatan. Hambatan ini beradal dari kedua negara yang pertama berasal dari Kamboja dan Thailand. Korupsi, korupsi yang terjadi di Kamboja dan Thailand semakin melebarkan jalan *traffickers* untuk memperdagangkan korbannya ke Thailand. Para *traffickers* akan menyuap aparat perbatasan, aparat imigrasi dan document untuk melancarkan aksi mereka. Sehingga, korupsi membuat upaya yang telah dilakukan oleh kedua negara tidak membuahkan hasil. Hambatan yang terakhir adalah industri prostitusi di Thailand. Pemerintah Thailand sadar akan industri ini tetapi seakan menutup mata karena devisa yang didatangkan oleh industri ini. Maka hasil dari kerjasama bilateral Kamboja-Thailand dalam mengatasi perdagangan perempuan yang terjadi di kedua negara masih membutuhkan kerja keras dan jalan panjang untuk mengatasi perdagangan perempuan yang terjadi di kedua negara. Sehingga, pada tahun 2013 ranking tier kedua negara turun menjadi *tier 2 watch list*.

IV.2 Saran

Berdasarkan analisis terhadap Kerjasama Bilateral Antara Kamboja-Thailand Dalam Mengatasi Perdagangan Perempuan Dari Kamboja Ke Thailand Periode 2009-2013, penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Pejabat pemerintah harus efektif menerapkan anti perdagangan perempuan baik didalam perundang-undangan maupun kebijakan.
- b. Rencana Nasional terbaru harus segera diusulkan sebagai sebuah upaya terbaru dalam memerangi perdagangan perempuan. Aksi untuk memerangi perdagangan manusia harus disetujui oleh pemerintah, dan intervensi harus mencakup semua bentuk perdagangan, bukan hanya perdagangan seks.
- c. Kerja sama Bilateral antara Kamboja dan negara-negara tetangganya, yaitu Thailand, Vietnam dan Malaysia, harus diperkuat untuk memungkinkan pemulangan yang aman dan cepat dari korban

perdagangan. Lebih banyak sumber daya harus dialokasikan untuk dukungan reintegrasi kembali.

- d. Program pencegahan perdagangan harus mengatasi akar penyebab yang membuat orang rentan terhadap perdagangan manusia.
- e. Semua anak-anak, remaja perempuan harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang melibatkan mereka dan dapat memberikan sebuah informasi dalam mencegah terjadinya perdagangan perempuan kebalikan.
- f. Kemiskinan belum tentu faktor utama penyebab terjadinya perdagangan perempuan tetapi masih menjadi faktor kerentanan utama. Dalam menyikapi persoalan kerentanan social ekonomi, pemerintah Kamboja harus mampu mengadakan pembangunan yang merata baik di kota ataupun di desa.
- g. Harus adanya persamaan didalam setiap undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kamboja dengan Thailand terhadap kesepakatan yang teruliskan didalam MoU, agar tidak ada lagi kesenjangan didalam undang-undang perlindungan korban perdagangan perempuan.
- h. Sesuai dengan yang ada di MoU, seharusnya kedua negara mampu meratifikasi MoU 5 tahun sekali dan melihat apakah kebijakan dan kerjasama yang ada berhasil atau gagal.